

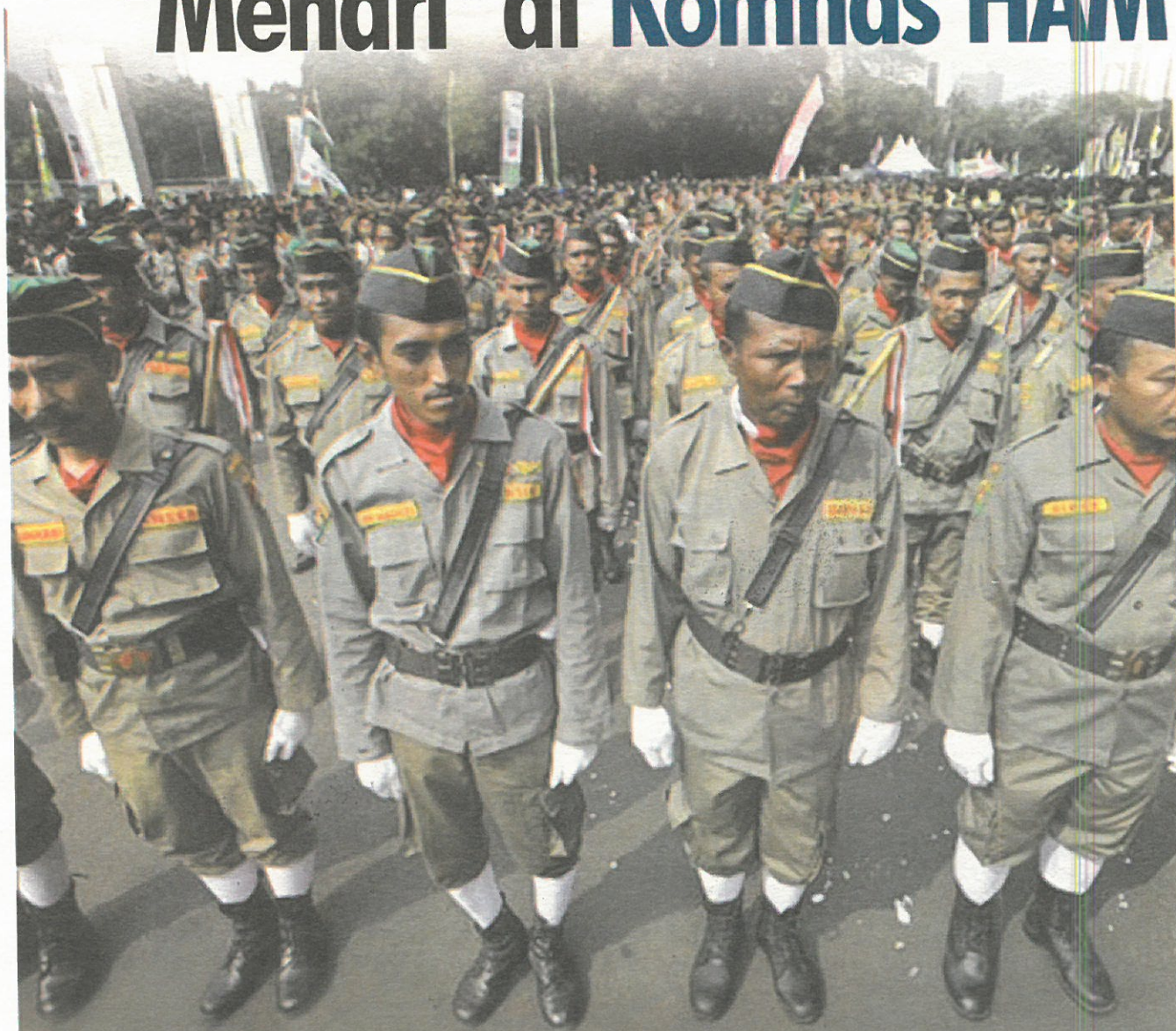
PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk  
00394 / Perpus-  
KPK / 2013

No. Panggil  
A TK. 11



# Setelah Genjer-genjer 'Menari' di Komnas HAM



Indonesia terancam masuk jurang, perang saudara, saling bantai seperti tahun 1965. Semangat Komnas HAM menggelar pengadilan HAM 1965, memanjakan keluarga eks PKI, membuat umat Islam terluka. Ada potensi konflik baru yang tak kalah besar. GP Ansor merapatkan barisan, menggelar tabayyun kebangsaan.

# Korupsi Biang Kerok Kerusakan

*La'natullahi ala raasyi wal murtasyi (al-Hadits)  
Allah melaknat penyogok dan yang disogok (Hadits)  
Arraasyi wal murtasyi fin naar (Hadits)  
Penyuap dan yang disuap tempatnya di neraka (Hadits)*

PBNU membuat sejarah. Sejarah itu dicatat dengan tinta emas. Begitu kata banyak orang. Pasalnya, di saat rakyat hidup menderita dan merasa sangat sebal oleh perilaku korup para koruptor, NU memperbolehkan koruptor dihukum mati. Mengapa? Karena koruptor telah menyengsarakan kehidupan rakyat. Koruptor telah merusak sendi-sendi negara. Kekayaan negara senilai ratusan juta triliun rupiah mereka habisi sendiri. Mereka dengan seenak perutnya merongrong kekayaan negara, sementara mereka sama sekali tak peduli dengan penderitaan dan kesengsaraan hidup rakyat. Berbagai kesulitan hidup rakyat tak pernah mereka pikirkan.

Ternyata, kasus korupsi bukan satu-dua-tiga melainkan ribuan banyaknya. Korupsi bukan cuma menilap uang jutaan rupiah melainkan sekali korupsi bisa menyikat ratusan triliun rupiah. Sungguh sulit dibayangkan perbuatan yang sangat hina itu malah marak dilakukan oleh orang-orang terhormat, para politisi dan pejabat publik di negara ini. Anehnya lagi, walau sudah sekian banyak kasus korupsi diadili dan koruptornya dihukum penjara, namun semua itu ternyata tak mengubah keadaan menjadi baik. Korupsi malah semakin merajalela. Pengadilan dan hukuman tak membuat mereka jera.

Maka, bergembiralah segenap rakyat di negeri ini, ketika NU mengambil keputusan dalam Munas NU dan Konbes Alim Ulama yang digelar di Ponpes Kempek, Cirebon, medio September 2012. Hukum mati koruptor! Hukum mati koruptor! Itulah keputusan yang sempat menggetarkan singgasana presiden di Gambir dan istana legislator di Senayan. Sejak pengumuman tentang bolehnya menetapkan hukuman mati bagi koruptor itu, tak hanya koruptor yang kaget, jajaran penegak hukum pun kaget juga. Para politisi dan pejabat publik yang suka bermain dengan uang haram itu tak kecuali pula.

Keputusan NU bahwa koruptor boleh dihukum mati tak ayal lagi mendapat sambutan sangat luas dari berbagai lapisan masyarakat dan ormas. Sejumlah tokoh politik, sosial, budaya, akademisi, pemerhati, dan segenap rakyat serta banyak pihak yang selama ini menerima dampak berat dari korupsi dan kesal oleh maraknya korupsi, serta mereka yang selalu mendengar suara hati nurani dan simpati kepada NU pun gembira, semuanya menyatakan dukungan penuh atas keberanian NU mengambil keputusan tersebut. "Keputusan hukuman mati bagi koruptor itu sangat layak karena kerusakan akibat korupsi sudah demikian luas dan

parah," kata KH Saifuddin Amsir, Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad Diniyah Al Waq'iyah sekaligus Rois Syuriah PBNU. "Hukuman mati ini ditujukan untuk menimbulkan efek jera dan membuka lebar jalan bagi kemaslahatan pembangunan bangsa," tambahnya.

Keputusan Munas NU ini dengan demikian menjadi sangat penting untuk dijadikan sumber rujukan dalam menentukan vonis bagi para koruptor, dan digunakan sebagai renungan dalam mengurai peliknya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi sebagai perilaku jahat dalam birokrasi di negara Indonesia sejauh ini sudah berkembang sedemikian sistemik, artinya suatu perbuatan korupsi melibatkan suatu sistem atau susunan yang teratur dan dilakukan secara rapi, sehingga sulit dilacak, sulit dibuktikan dan sulit menyentuh mereka yang berada di posisi puncak kekuasaan dari sistem praktik korupsi.

Aparat penegak hukum dan alat-alat hukum yang ada berupa undang-undang dan peraturan tak mampu memberantas korupsi. Buktinya, terlalu sedikit kasus korupsi yang bisa diselesaikan dibandingkan dengan kasus-kasus yang tak bisa mereka selesaikan dan temukan. Ditinjau dari sudut hukum, instrumen hukum yang ada sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun hal tersebut tidak ditunjang oleh perilaku aparat penegak hukum. Perilaku buruk aparat penegak hukum mulai dari kehakiman, kejaksanaan hingga kepolisian berbanding terbalik hingga 360 derajat dengan instrumen hukum yang ada. Tak jarang penegak hukum malah jadi mafia hukum, melindungi para kriminal, termasuk para koruptor. Karena fakta inilah, maka tidaklah mengherankan bila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat rendah sebagai akibat logis dari buruknya perilaku aparat penegak hukum. Ini baru salah satu dari sekian kerusakan itu.

NU melalui Munasnya di Cirebon memutuskan: Hukum mati koruptor. Islam menegaskan Allah melaknat para koruptor dan mereka yang bekerjasama dengan koruptor. Bahkan sebuah ayat al-Quran menyatakan: Hukuman bagi orang yang membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau diasingkan. Semoga terobosan

NU ini bisa terwujud dalam kenyataan. ..

## Kapan E-KTP Selesai?

Perpustakaan  
KPK  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Direktorat Litbang

Proyek pemerintah dengan dana triliun ternyata tak kunjung beres. Sampai sekarang E-KTP yang digembar-gemborkan belum juga selesai. Padahal, saya baca di media, e-KTP akan otomatis jadi DPT. Saya sih setuju-setuju saja sebab memang sebaiknya ada data tunggal bagi warga negara yang bisa digunakan untuk semua keperluan, baik oleh warga negara itu sendiri maupun oleh negara.

Tapi yang jadi soal, aparaturnegara yang kurang mumpuni dalam membuat aturan termasuk juklak-juknisnya sehingga seringkali di tingkat bawah semua jadi kacau, jadi rumit, dan ujung-ujungnya molor.

E-KTP juga sama, sebab sampai sekarang banyak masyarakat yang belum mendapat e-KTP, padahal pendaftaran dan proses mengurusnya sudah lama, massal lagi, sehingga terkesan sangat negara serius mengurus masalah jati diri warga negaranya, masyarakat juga menunjukkan antusiasme dengan program ini, tapi kok jadi begini akhirnya, molor dan molor.

Lagi-lagi kekhawatiran masyarakat itu benar-benar terjadi. Dan seperti kata orang Jawa "hangathangat tai ayam", hanya semangat di awal, tapi ujung-ujungnya ruwet di belakang, apalagi sampai ada permainan, yang sudah membudaya pada bangsa ini. Kita tak akan berhasil bila suka memainkan program negara, termasuk dalam masalah kependudukan ini. Jadi saya berharap e-KTP segera diselesaikan agar kita punya KTP yang benar-benar KTP, yang kita bangga memilikinya. Dan harus diingat, KTP adalah hak warga negara dan kewajiban bagi negara memberikan kepada rakyatnya. Jadi, tidak ada hak yang dipersulit. Apalagi tidak diberikan. Dan tak layak bagi aparat negara mempersulit pengurusan KTP sebab hal itu kewajibannya. Kalau tidak beres, bagaimana pertanggungjawabannya?

**Sumargono**  
Wonoayu Sidoarjo

# Mengapa Palu Arit?

Pembaca, dua edisi berturut-turut, Majalah Dumas menurunkan laporan khusus perihal bahaya komunisme. Yang pertama (Edisi 17 Oktober 2012) untuk menjawab majalah mingguan Tempo yang terbit sangat miring, hanya

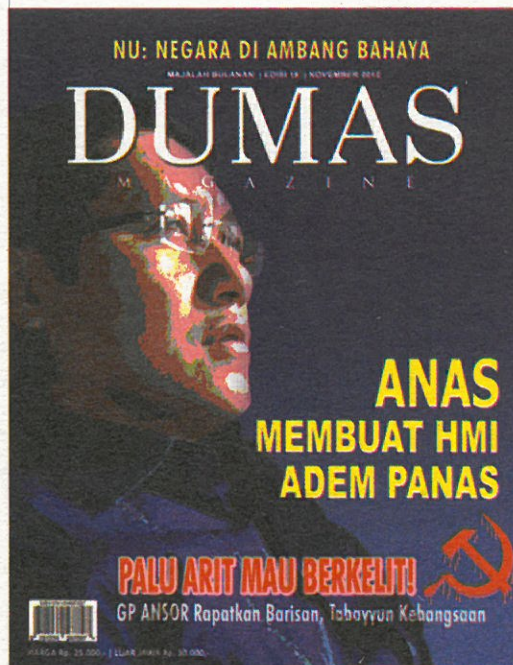
amatlah rendah. Ini memerlukan daya gerak tersendiri, agar mereka bisa membaca, memahami, m e m a k n a i dengan benar sejarah kelam yang menimpa bangsa Indonesia pada saat itu.

Terus terang, semakin hari semakin berkurang saksi sejarah yang sanggup bercerita. Sebelum mereka (saksi hidup) itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Allah SWT. maka, ada baiknya kalau sejarah kelam yang kini tercecer di manamana itu, disatukan kembali. Memang banyak buku yang mengupas peristiwa G30S/PKI, tetapi tidak semuanya mampu menjawab tuntas pertanyaan generasi masa kini. Itulah diantara sebab, mengapa Majalah Dumas kembali menurunkan liputan panjang tentang Palu Arit.

Pembaca yang budiman, sebagai bangsa Indonesia kita tentu tidak rela, jika kerukunan dan ketuhanan negeri terkoyak oleh

manuvermanuver jangka pendek, meski itu dilakukan atas nama HAM atau demokratisasi. Risiko yang harus dibayar teramat mahal, konflik horisontal. Sejarah pahit 1965, harus kita sudahi, ini kalau bangsa Indonesia ingin maju. Rekonsiliasi formal yang digagas Komnas HAM, sesungguhnya baik-baik saja. Tetapi formalisasi rekonsiliasi yang hanya untuk mencari kemenangan sepihak, tidak berpikir dampak sosialnya yang jauh lebih besar, sungguh naif dilakukan.

Melalui edisi ini kita ingin mengajak semua pihak berpikir jernih. Bangsa ini sudah lelah, jangan dibikin lelah. Negara ini sudah sulit, jangan malah dipersulit. Masih terlalu banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Bukankah begitu? Waallahu'alam bish-shawab. ●



menonjolkan PKI dan simpatisannya sebagai korban. Sebaliknya, Tempo menggambarkan, mendramatisasi siapa saja yang dianggap sebagai jagal anggota atau simpatisan PKI itu.

Untuk itu, Tempo mengumbar 71 halaman. Protes pun berdatangan, banyak umat Islam keberatan dan melihat ini bagian dari gerakan memperlemah umat Islam, khususnya NU dan GP Ansor-nya yang, ketika peristiwa G30S/PKI tahun 1965 itu berlangsung, merekalah yang berhadapan dengan kaderkader komunis itu. Lebih dari itu, ada yang berteriak Tempo sudah memelintir nara sumber. Waallahu'alam.

Pembaca, selain di atas, sekarang ini pengetahuan umat Islam atau generasi muda Islam terhadap sejarah G30S PKI